

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
(KOTAKU) DI KELURAHAN RABANGODU UTARA
KOTA BIMA**

**(STUDI KASUS : PERMUKIMAN KUMUH PADA KAWASAN LINGKUNGAN
KELURAHAN RABANGODU UTARA KOTA BIMA)**



Disusun Oleh :

M. ALFIAN

NIM. 41413A0020

**Diajukan sebagai Syarat Menyelesaikan Studi
pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jenjang Strata I
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI
KELURAHAN RABANGODU UTARA KOTA BIMA

Disusun Oleh:

NANA : M. ALFIAN

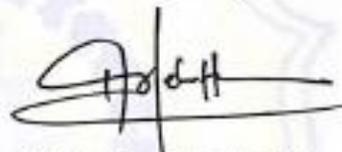
NIM : 41413A0020

Mataram, 10 AGUSTUS 2021

Pembimbing I,


Ardi Yuniarman ST., M.Sc
NIDN. 0818068001

Pembimbing II,


Febrita Susanti, ST., M.Eng
NIDN. 04028501

Mengetahui,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK

Dekan,



Dr. Eng. M. Islamy Rusyda, ST., MT
NIDN. 0824017501

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI
KELURAHAN RABANGODU UTARA KOTA BIMA**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

NANA : M. ALFIAN

NIM : 41413A0020

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada hari, Hari, Tanggal Ujian
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

1. Penguji I : ARDI YUNIARMAN, ST.,M.Sc 
2. Penguji II : RASYID RIDHA, ST.,M.Si 
3. Penguji III : FARIZ PRIMADI HIRSAN, ST., MT 

Mengetahui,

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK**



Dekan,


Dr. Fauzan Islamy Rusyda, ST., MT

NIDN. 0824017501

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Alfian

Nim : 41413A0020

Judul Skripsi : "Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar akademik (Sarjana, Megister, Dan/Atau Dokter) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram, maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya ini, dan sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, 12 Agustus 2021


METERAN
TEMPEL
10000
F30AJX425002021
Alfian
NIM:41413A0020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Alfan
NIM : 1413A0020
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 16 - 08 - 1996
Program Studi : Teknik Puk
Fakultas : Teknik
No. Hp/Email : 082 739 822 133 / m.alfanurs@gmail.com
Judul Penelitian : - Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
di Kelurahan Kubangode Utara Kota Bima

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. *aga*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : _____

Penulis



M. Alfan
NIM 1413A0020

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN: 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370-833723 Fax. 0370-841906

Website : <http://www.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Alfian
NIM : 141340010
Tempat/Tgl Lahir : Bima / 16 - 08 - 1996
Program Studi : PPSK
Fakultas : Teknik
No. Hp/Email : 082 539 822 433 / M.alfian10@gmail.com
Jenis Penelitian : [X] Skripsi [] KTI [] Tesis []

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mempertahankan nama saya sebagai penulis/pemilik dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 01 - 09 -2021

Penulis



M. Alfian
NIM. 141340010

Mengotahui
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos, M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Jadi Orang Berguna”



LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan, kemudahan serta izin untuk menyelesaikan studi saya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Terimakasih kepada orang tua saya Bapak, Ibu, Nita dan Tri yang saya sayangi yang tidak pernah putus untuk mendoakan dan mendukung saya dari segi moral, materil dan memberikan saya semangat atas semua yang saya jalani selama kuliah ditanah rantauan.
2. Terimakasih kepada Bapak Ibu Febrita susanti, ST,M.Eng selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan semangat, serta bapak Ardi Yuniarman ST.,M.Sc selaku Dosen Pembimbing I dan sekali lagi Ibu Febrita susanti, ST,M.Eng selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan masukan demi kelancaran proses penyelesaian laporan ini.
3. Terimakasih kepada Imam Ilmiah'12, Rizky'14 Sipil, Sahrumsah'14, muamar khadafi'14, Fikri Maulana Alumni'14, Ikhlas'17, Mahyudin'14, Heci'14, Fauzi pla'14, Raihan oka Putra'18 mesin Unram, bang Mukramin atas kehangatan, kebaikan, susah dan senang selama selama beberapa tahun ini.
4. Terimakasih Kepada teman-teman PWK'14 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, keceriaan, candaan dan kenangan selama beberapa tahun ini.
5. Teman- teman, kakak-kak dan adik-adik Himpunan Perencanaan Wilayah dan Kota. Terima kasih dan tetap semangat!

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “*Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Rabangodu Utara*” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. Eng. M. Islamy Rusyda, ST.,MT Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Febrita susanti, ST,M.Eng selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
4. Bapak Ardi Yunnarman ST., M.Sc selaku Dosen Pembimbing I yang juga telah memberikan banyak arahan dan masukan demi kelancaran proses penyelesaian laporan ini.
5. Ibu Febrita susanti, ST,M.Eng selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan banyak arahan dan masukan demi kelancaran proses penyelesaian laporan ini.

Semoga laporan ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota.

Mataram, 10 Agustus 2021

Penulis

ABSTRAK

M. ALFIAN. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima (dibimbing oleh Ardi Yuniarman dan Febrita Susanti).

Penelitian ini bertujuan untuk implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Bagaimana ketepatan program KOTAKU dalam mencapai tujuan program yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh program KOTAKU ini telah terlaksana hingga perkumuhan perkotaan yang layak huni dan permukiman kumuh 0% di Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang dimana penggunaan jenis penelitian ini berfungsi untuk menginterpretasikan hasil olahan data analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi dan metode instansional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima belum terlaksana semua karena masih terdapat lokasi yang masih dalam pengerjaan dan masih belum dikerjakan terkandala biaya dan kondisi.

Kata Kunci : Implementasi, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

ABSTRACT

M. ALFIAN. Implementing the City Without Slums Program (KOTAKU) in North Rabangodu Village, Bima City (supervised by Ardi Yuniarman and Febrita Susanti).

This study aims to implement the City Without Slums Program (KOTAKU). How the accuracy of the KOTAKU program in achieving program objectives aim to find out how far the KOTAKU program has been implemented to livable urban slums and 0% slum settlements in North Rabangodu Village, Bima City. This study employs a qualitative research design to interpret the results of the processed data analysis. Primary and secondary data sources were employed in this investigation. In-depth interviews, direct observation, documentation, and institutional procedures were used to obtain data. The findings of this study show that the City Without Slums (KOTAKU) program in North Rabangodu Village, Bima City, has yet to be implemented since there are still areas under development not completed due to costs and circumstances.

Keywords: Implementation, City Without Slums Program (KOTAKU)

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN.	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4.1 Ruang Lingkup Lokasi.....	5
1.4.2 Ruang Lingkup Materi.	5
1.5 Manfaat Penelitian.	5
1.6 Sistematika Pembahasan.	6
BAB II	
PENDAHULUAN.....	7
2.1 Terminologi Judul	7
2.2 Tinjauan Teori.....	8
2.2.1 Administrasi Publik Dan Kebijakan Publik	8
2.2.1.1 Pengertian Administrasi Publik.....	8

2.2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2.2.2 Implementasi	11
2.2.2.1 Pengertian Implementasi.....	11
2.2.2.2 Langkah-Langkah Dalam Implementasi Kebijakan.....	13
2.2.2.3 Faktor-Faktor Pendukung Implementasi.....	14
2.2.2.4 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi.....	16
2.2.3 Program KOTAKU	18
2.2.3.1 Strategi Pelaksanaan Program KOTAKU	20
2.2.3.2 Prinsip Program KOTAKU.....	21
2.2.3.3 Tujuan Program KOTAKU.....	23
2.3 Penelitian Terdahulu	29
2.4 Sintesa Penelitian	30
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Lokasi Penelitian.....	31
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.3.1 Data Primer.....	33
3.3.2 Data Sekunder.....	33
3.3.1.1 Teknik Pengumpulan Jenis Data Primer.....	34
3.3.1.2 Teknik Pengumpulan Jenis Data Sekunder.....	34
3.4 Variabel Penelitian.....	34
3.5 Metode Analisis Data.....	35
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	35
3.6 Desain Survey.....	37
BAB IV	
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Raba.....	44
4.1.1 Administrasi Kecamatan Raba.....	44
4.1.2 Administrasi Kelurahan Rabangodu Utara.....	45

4.1.3 Kondisi Fisik Dasar.....	45
4.1.3.1 Topografi.....	45
4.1.3.2 Geologi.....	45
4.1.3.3 Klimatologi.	47
4.1.4 Kondisi Fisik Binaan.....	49
4.1.4.1 Kependudukan.....	49
4.1.4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	50
4.1.4.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian.....	51
4.1.5 Pola Penggunaan Lahan.	52
4.1.6 Potensi Ekonomi dan Potensi Wilayah.	52
4.1.7 Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Rabangodu Utara.....	53
4.2 Analisis Impelementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dikelurahan Rabangodu Utara.....	56
4.2.1 Bangunan Gedung.....	58
4.2.2 Pembangunan Jalan Lingkungan.....	60
4.2.3 Akses Air Bersih/Minum.	65
4.2.4 Pembangunan Drainase Lingkungan.....	70
4.2.5 Pengelolaan Air Limbah.	75
4.2.6 Pengelolaan Persampahan.....	78
4.3 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kota Tanpa kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rabangodu Utara	81
4.3.1 Faktor Pendukung	81
4.3.2 Faktor Penghambat.....	85
BAB V	
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR GAMBAR

2.1 Administrasi Kelurahan Rabangodu Utara	32
4.1 Peta Topografi Kelurahan Rabangodu Utara	46
4.2 Peta Geologi Rabangodu Utara.....	48
4.3 Peta Rencana Penataan Bangunan Gedung.....	58
4.4 Peta Rencana Penataan Jaringan Jalan.....	61
4.5 Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh.....	63
4.6 Peta Hasil Implementasi Pembangunan Jalan.....	64
4.7 Peta Rencana Akses Air Bersih/Minum.....	66
4.8 Peta Hasil Implementasi Akses Air Bersih/Minum	68
4.9 Kegiatan Sebelum Program Kota Tanpa Kumuh.....	69
4.10 Peta Rencana Jaringan Drainase	71
4.11 Peta Rencana Implementasi Drainase.....	74
4.12 Peta Rencana Pengelolaan Air Limbah.....	75
4.13 Kegiatan Sebelum Program Kota Tanpa Kumuh.....	77
4.14 Peta Rencana Pengelolaan Sampah.....	78
4.15 Kegiatan Sebelum Program Kota Tanpa Kumuh.....	78

DAFTAR TABEL

2.1 Lokasi Program Kerja KOTAKU.	25
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Sintesa Penelitian	30
3.1 Tabel RT/RW Dan Luas Wilayah Kelurahan Rabangodu Utara	31
3.2 Variabel Penelitian	35
3.3 Desain Survei	37
4.1 Luas Wilayah Kecamatan Raba	44
4.2 Luas Lahan Dan Kemiringan	45
4.3 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kelurahan Rabangodu Utara	49
4.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	50
4.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian.....	51
4.6 Penggunaan Lahan Kelurahan Rabangodu Utara	52
4.7 Data Lokasi Kumuh SK Walikota Bima No 188.45/650/IX/2020	54
4.8 Total Pengurangan Kumuh di Kelurahan Rabangodu Utara.....	55
4.9 Hasil Implementasi Bangunan Gedung Program KOTAKU	59
4.10 Hasi Implementasi Jalan Lingkungan Program KOTAKU	62
4.11 Hasil Implementasi Akses Air Bersih/Minum Program KOTAKU	67
4.12 Hasil Implementasi Drainase Lingkungan Program KOTAKU	72
4.13 Hasil Implementasi Air Limbah Lingkungan Program KOTAKU.....	76
4.14 Hasil Implementasi Persampahan Lingkungan Program KOTAKU	79

BAB I.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharjo: 1997).Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 2011, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), secara eksplisit dicantumkan bahwa salah satu ruang lingkup penyelenggaraan PKP adalah pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Hal ini yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan, strategi dan program oleh berbagai institusi pemerintah yang bertanggungjawab.

Di Indonesia sendiri, penanganan permukiman kumuh telah dimulai sejak tahun 1969 melalui Program Perbaikan Kampung (*Kampoeng Improvement Programe/KIP*) dan berakhir tahun 1989. Kemudian dilanjutkan dengan Pembangunan Perumahan Berbasis pada Kelompok (P2BPK) sepanjang periode 1989-2000, dan berbagai program lainnya yang terus sambung menyambung ketika masa periodenya habis seperti, *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project* (NUSSP), Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, dan yang terbaru adalah Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dimulai pada tahun anggaran 2014 dan akan selesai pada tahun 2019. Pada era tahun 2000,

program yang dilaksanakan terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu, bersifat menyeluruh dan fokus pada aspek fisik saja. Selain itu, perubahan yang terjadi tidak begitu signifikan. Sepanjang periode tahun 1993-2009 penurunan perumahan dan kawasan permukiman kumuh hanya sebesar 8,18%, hal ini terutama disebabkan oleh tidak tersedianya payung kebijakan dan kurangnya pelibatan masyarakat (Mungkasa, 2012). Menurut Hariyanto, 2000 menyebutkan bahwa perhatian utama dalam penanganan permukiman kumuh adalah aspek perilaku masyarakat terkait kesadaran pentingnya hidup sehat. Penanganan permukiman kumuh tidak hanya berfokus pada aspek fisik saja namun juga menangani perilaku masyarakat yang bermukim di dalamnya, maka perubahan yang terjadi akan bersifat menyeluruh, termasuk kesejahteraan masyarakatnya (Brodjonegoro, 2014).

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015-2019, sebagai upaya pencapaian target RPJMN 2015-2019 dalam mencapai 0 Ha kawasan kumuh. Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program pemberdayaan masyarakat nasional sebelumnya. Program tersebut telah memberikan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan lembaga daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping, program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dirancang dengan Pemerintah Daerah sebagai nahkoda dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan dan Kolaborasi sebagai Platform serta masyarakat sebagai pelaku penanganan kumuh.

Berdasarkan Pedoman Teknis Program KOTAKU 2015, Program Kota Tanpa Kumuh adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 Kota/Kabupaten di 34 Provinsi yang menjadi Platform atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, Kota/Kabupaten, pihak donor,

swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Sama seperti Kota-kota lainnya di Indonesia, Kota Bima juga sedang gencarnya melakukan penanganan permukiman kumuh. Kota Bima merupakan kota yang secara administratif terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Bima dalam kedudukannya menjadi salah satu kawasan yang menjadi daerah transit yang memungkinkan sekelompok masyarakat yang datang dari luar kota bermukim baik untuk sementara maupun dalam waktu yang lama. Dibeberapa wilayah administrasi Kota Bima masih banyak ditemukan kawasan permukiman kumuh. Kota Bima mulai melakukan penanganan permukiman kumuh sejak tahun 2017 melalui program kota tanpa kumuh (KOTAKU) atau National Slum Upgrading Program (NSUP).

Berdasarkan SK Walikota Nomor 371 tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Bima, tercatat sebanyak 17 kelurahan di Kota Bima masuk dalam kategori kumuh. Adapun 17 kelurahan kumuh di Kota Bima meliputi Kelurahan Kolo, Melayu, Jatiwangi, Jatibaru, Manggemaci, Santi, Rabangodu Utara, Rabadompu Barat, Rontu, Penaraga, Dara, Nae, Paruga, Sarae, Tanjung, Sambinae dan Monggonao. Kelurahan kategori kumuh terbagi di lima kecamatan, adapun tolak ukur tentang kekumuhan dilihat dari beberapa kriteria, seperti drainase, kualitas sanitasi, ketersediaan air bersih, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur jalan. Besarnya Anggaran Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bima perkelurahan berbeda-beda ada yang sampai 1 milyar dan ada yang paling rendah Rp.350 juta (kahaba.net diakses pada 21 juli 2021).

Kelurahan Rabangodu Utara merupakan salah satu kelurahan di Kota Bima dengan topografi luas lahan datar (0-2%) paling besar yaitu sebesar 2950

ha dan lahan dengan gelombang (2-15%) terbesar 1850 ha. Pertumbuhan penduduk di Kelurahan Rabangodu Utara semakin meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan luas lahan permukiman relatif tetap, sehingga penduduk sulit memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang nyaman. Permukiman yang berkembang yaitu permukiman padat kota dengan mata pencaharian utama penduduk bekerja di sektor informal. Kondisi permukiman di Kelurahan Rabangodu Utara cenderung kumuh karena pertumbuhan permukiman tidak diikuti dengan perencanaan permukiman sehingga timbul lingkungan permukiman padat serta terdapat ancaman banjir yang semakin memperburuk visual permukiman.

Dalam tujuan program KOTAKU yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang telah ditetapkan. Berdasarkan kondisi eksisting yang ada saat ini masih terdapat jalan rusak dan bangunan-bangunan yang tidak layak huni bagi masyarakat. Kenyataan tersebut di atas, mendasari perlunya adanya penelitian tentang “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima (Studi Kasus : Permukiman Kumuh pada Kawasan Lingkungan Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pada program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program kota tanpa kumuh di Kelurahan rabangodu utara?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program kota tanpa kumuh di Kelurahan rabangodu utara

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan dalam penelitian ini terbagi menjadi ruang lingkup lokasi dan ruang lingkup materi.

1.4.1 Ruang Lingkup Lokasi

Lingkup lokasi penelitian ini adalah salah satu kawasan prioritas penanganan kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Bima No. 371 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh berada pada wilayah kelurahan Rabangodu Utara yang luasnya 69,70 ha dengan luas permukiman kumuh sebesar 21,39 ha. Adapun batasan-batasan wilayah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Penaraga
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Rabadompu Barat
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Rabangodu Selatan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Lewirato

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pada program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

1.5. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sumbangsih bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perencanaan wilayah dan Kota yang digunakan untuk menganalisis bagi perencanaan permukiman dan digunakan sebagai wawasan pembelajaran.
2. Secara praktis bagi masyarakat, dapat berpartisipasi dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh dan bagi Dinas Permukiman dan pihak yang

berkompeten dapat sebagai bahan masukan bagi penentuan kebijakan dan masukan penataan serta penanganan permukiman kumuh.

1.6. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan ruang lingkup penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, tinjauan teori, tinjauan kebijakan dan referensi terkait dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode penelitian yang meliputi metode pengumpulan data dan metode analisis, variabel penelitian, tahapan penelitian, desain survey dan penjadwalan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu Analisis Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kelurahan Rabangodu UtaraKota Bima (Studi Kasus : Permukiman Kumuh pada kawasan Kelurahan Rabangodu UtaraKota Bima)

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari semua proses dan hasil dalam penelitian serta adanya saran.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Terminologi Judul

Terminologi judul adalah pembahasan mengenai pengertian dan makna dari sebuah kata judul agar bisa dipahami tujuan ataupun sarannya. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima (Studi Kasus : Permukiman Kumuh di Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima)” adapun pengertiannya sebagai berikut :

1. Implementasi : Tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahab (2001:65).
2. Program : sebuah bahasa rencana untuk membuat sebuah hal agar tentunya menjadi sebuah hal yang lebih baik (Ema Utami,2006)
3. KOTAKU : Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah satu dari sejumlah upaya strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 akses sanitasi layak (Disperkimtan,2019)

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini yang berjudul “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KUMUH) di Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima (Studi Kasus : Permukiman Kumuh di Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima)” adalah untuk mengetahui perwujudan dari hasil Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung nya

2.2. Tinjauan Teori

Tinjauan Teori ini dapat diperoleh dari studi literature dan pengamatan terhadap hasil-hasil penelitian para peneliti terdahulu yang terkait dengan penelitian “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KUMUH) di Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima (Studi Kasus : Permukiman Kumuh di Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima)”

2.2.1 Administarasi Publik dan Kebijakan Publik

Administrasi Publik dan Kebijakan Publik Pada setiap negara memerlukan administrasi publik untuk melakukan kegiatan dibidang melayani masyarakat. Pada setiap negara juga melakukan kegiatan administrasi publik dengan cara yang berbeda. Perbedaan ini menunjukkan karakteristik cara kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan. Kegiatan administrasi publik dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk dan dipilih seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif serta para pelaksana yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti di kecamatan dan kelurahan.

2.2.1.1 Pengertian Administarsi Publik

Kata “publik” mempunyai dimensi arti yang agak banyak, secara sosiologis kita tidak boleh menyamakannya dengan masyarakat. Perbedaan pengertiannya adalah masyarakat diartikan sebagai “sistem antar hubungan sosial di mana manusia hidup dan tinggal secara bersama-sama”. Di dalam masyarakat tersebut terdapat norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang mengikat atau membatasi kehidupan anggota-anggotanya. Di lain pihak kata “publik” diartikan sebagai “kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang sama. Tidak ada norma atau nilai yang mengikat/membatasi perilaku publik sebagaimana halnya pada masyarakat, karena publik itu sulit dikenali sifat-sifat kepribadiannya (identifikasinya) secara jelas. Satu hal yang menonjol adalah mereka mempunyai perhatian atau minat yang sama”.

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai definisi dari administrasi sebagai berikut, Administrasi dapat diartikan sebagai pengorganisasian dan pengerahan sumber-sumber manusia dan material untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan (J.M Pfiffner dalam Islamy (2003: 1). Administrasi adalah merupakan aktivitas kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama (H.A. Simon (1958)

Kata Administration dalam bahasa Inggris berasal dari kata ad + ministrare dalam bahasa Latin yang mempunyai arti “to serve” atau memberikan jasa, pelayanan, bantuan, melayani atau mengabdikan. Karakteristik utama administrasi adalah memberikan pelayanan dan pengabdian yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Public Administration adalah merupakan bentuk ‘aksi’ dari pemerintahan, atau merupakan alat/sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintah. Menurut S.K. Balley dalam Islamy (2003: 15) Administrasi Publik seharusnya mengembangkan 4 (empat) macam teori yaitu:

1. Teori Deskriptif : Teori yang bertujuan untuk mendeskripsikan struktur hierarkhis dan hubungan-hubungannya dengan lingkungan berbagai tugas-tugasnya.
2. Teori Normatif : Teori yang menjelaskan mengenai ‘tujuan nilai’ yang seyogyanya dicapai.
3. Teori Asumtif : Teori yang mampu memberikan pemahaman yang benar dan ketat atas siapa sebenarnya yang dimaksud dengan ‘person administratif’.
4. Teori Instrumental : Teori yang mampu senantiasa terus-menerus melakukan penyempurnaan atas teknik manajerial yang bertujuan untuk meningkatkan tujuan publik secara efektif dan efisien.

Dengan keempat teori tersebut N. Henry menjelaskan adanya 3 pilar administrasi publik, yaitu: (1)

- a. perilaku organisasi dan perilaku orang-orang yang terdapat dalam organisasi;
- b. teknologi manajemen dan institusi-institusi implementasi kebijakan; dan
- c. kepentingan publik yang terkait dengan pilihan etis setiap individu dan masalah-masalah publik.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan dua orang atau sekelompok orang dalam mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

2.2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Carl Friedrich, menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Dari penjelasan Carl Friedrich tadi dapat dipertegas lagi dengan pendapat para ahli lainnya, pendapat Knoepfel dan kawan-kawan (2007) saat mereka mengartikan kebijakan sebagai :

Serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik publik/pemerintahan maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah public(Knoepfel, 2007).

Tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau yang tidak terjadi) (Wilson dalam Wahab, 2014;13).

Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (W.I Jenkins).

Berdasarkan berbagai definisi tentang kebijakan publik dari para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua pembuatan kebijakan publik (public policy making) itu akan selalu melibatkan pemerintah, dengan cara tertentu. Dalam arti lain kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah yang ada pada masyarakat dalam satu lingkup negara. Sedangkan kebijakan publik memiliki 4 tahap dalam pelaksanaannya yaitu: planning, formulasi, implementasi, dan evaluasi.

2.2.2 Implementasi

2.2.2.1 Pengertian Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Menurut Sopiarno (2015) istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam Wahab (2008: 65), implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata

pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu proses implementasi tidak hanya menyangkut perilaku bahan-bahan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Menurut Browne dan Wildavsky di dalam Usman (2002 : 70), mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan Majone dan Wildavsky di dalam Nurdin Usman mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Sementara itu, Schubert di dalam Nurdin Usman, mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Usman (2002 : 70) sendiri mengemukakan bahwa implementasi adalah sesuatu yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa, implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Menurut Setiawan (2004 : 70) , implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa, implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya

suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Harsono (2002 : 67) mengemukakan bahwa, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses atau langkah yang ditujukan dalam pengembangan kebijakan, dalam rangka penyempurnaan suatu program yang telah ditetapkan. Implementasi dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu, tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

2.2.2.2 Langkah-langkah dalam Implementasi Kebijakan

Soenarko (2005) menyebutkan bahwa terdapat tiga kegiatan pokok penting untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan, yaitu:

a. Interpretation

Dalam implementasi kebijakan, interpretation dimaksudkan sebagai usaha yang dilakukan untuk membuat pelaksana kebijakan mengerti maksud dari pembuat kebijakan dan untuk mengetahui apa dan bagaimana hal tersebut diwujudkan. Dalam kegiatan interpretation pelaksana kebijakan perlu memposisikan diri sebagai pembuat kebijakan agar supaya dapat memahami kehendak dari pembuat kebijakan.

b. Organization

Dalam implementasi kebijakan, organization dimaksudkan sebagai pembentukan badan-badan atau unit-unit beserta metode yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan

dari kebijakan tersebut. Seluruh kegiatan dalam sistem dikerjakan dengan pembagian tugas dan kewajiban secara efisien sehingga efisiensi dari pelaksanaan kebijakan dapat dicapai.

c. *Application*

Dalam implementasi kebijakan, *Application* merupakan penerapan dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai. Bergman dalam Soenarko (2005) menyebutkan bahwa “*programmed implementation* merupakan pelaksanaan kegiatan dalam *application* yang dilakukan secara runtun dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam program”. Kebalikan dari *programmed implementation* yaitu *adaptive implementation*.

Bergman dalam Soenarko (2005) menjelaskan bahwa *adaptive implementation* merupakan “pelaksanaan kegiatan dalam *application* yang memperhatikan kondisi dan situasi masyarakat yang dikenakan kebijakan pada saat itu sehingga mengakibatkan adanya modifikasi dari kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

2.2.2.3 Faktor-faktor Pendukung Implementasi

Adapun faktor-faktor pendukung implementasi menurut para ahli sebagai berikut :

1. Respeknya Anggota Masyarakat terhadap Otoritas dan Keputusan keputusan Pemerintah.

Sebenarnya kita telah terdidik untuk secara moral untuk mematuhi hukum/undang-undang sebagai hal yang benar dan tepat. Sehingga menurut Anderson dalam Islamy (2007, h. 108) menyatakan apabila kita merasa bersalah, maka kita akan malu pada diri kita. Rasa malu inilah yang menyadarkan kita untuk mau menerima kebijakan tersebut. Ketika warga menghormati pemerintah yang berkuasa dikarenakan legitimasinya, maka secara

otomatis mereka akan turut pula memenuhi ajakan pemerintah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan pemerintah. Oleh karena itu ketika masyarakat mulai menghormati keputusan keputusan yang dibuat pemerintah, maka masyarakat tersebut akan turut melaksanakan kebijakan yang dibuat pemerintah.

2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.

Seringkali banyak orang melaksanakan kebijakan publik sebagaimana sesuatu yang logis, rasional dan adil. Sehingga menurut Islamy (200, h.109) disaat seseorang sadar akan pentingnya sebuah pelaksanaan kebijakan, maka iya akan sadar dan patuh dalam melaksanakan kebijakan tersebut

3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat pejabat pemerintah yang berwenang untuk melalui prosedur yang benar.

Apabila suatu kebijakan negara dibuat berdasarkan ketentuan yang telah berlaku maka menurut pendapat Islamy (200, h.109) masyarakat cenderung untuk mempunyai kesediaan diri untuk menerima kebijakan tersebut.

4. Adanya hukuman-hukuman tertentu bila tidak melaksanakan kebijakan.

Dengan adanya hukuman tertentu yang bersifat memaksa, maka menurut Islamy (2007, h.109) orang-orang akan mematuhi kebijakan, karena ia takut akan terkenak hukuman, misalnya denda, kurungan, dan sanksi-sanksi lain. Karena itu salah satu strategi dalam upaya untuk memenuhi Pelaksanaan implementasi kebijakan adalah dengan cara menghindari sanksi hukum yang berat pada pada setiap orang yang melanggarnya.

5. Adanya kepentingan pribadi.

kepentingan pribadi ini mengacu pada seseorang atau sekelompok orang yang sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu proyek implementasi kebijakan, maka dari itu menurut Islamy (2007, h. 109) mereka dengan senang hati akan menerima kebijakan, mendukung, maupun menjalankan kebijakan yang ditetapkan.

2.2.2.4 Faktor-faktor Penghambat Implementasi

Faktor lain adalah faktor yang menyebabkan suatu pelaksanaan kebijakan menjadi terhambat. Penilaian pelaksanaan kebijakan yang kerap kali dianggap gagal bukan saja dilihat dari segi pelaksanaan saja, melainkan juga dilihat dari segi tujuan yang terkadang didalam kebijakan tersebut haruslah tercapai, pendapat Adrerson dikutip Islamy (2007, h.110-112) menyatakan bahwa seseorang enggan untuk mengimplementasikan kebijakan dikarenakan oleh sebab-sebab sebagai berikut.

1. Adanya ketidak patuhan selektif terhadap hukum

Sikap ketidakpatuhan selektif ini merupakan penjelasan Islamy (2007, h. 110) dikarenakan ada beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang kurang meningkat pada individu-individu. Seseorang terkadang patuh pada suatu aturan, namun di sisi lain seseorang terkadang tidak patuh pada aturan.

Ketidakpatuhan Selektif terhadap hukum yang berlaku. Bisa jadi karna menganggap bentuk output kebijakan yang diberikan masi perlu dilakukan perubahan-perubahan, dengan kata lain output kebijakan yang diberikan, dianggap masi perlu adanya perbaikan/revisi, sehingga pelaksanaanya tidak dapat dipaksakan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penolakan pelaksanaan kebijakan.

2. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi

Apabila seseorang terlibat ke dalam suatu organisasi tertentu, dan tujuan organisasinya bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuat,

maka menurut islamy (2007,h.121) mereka cenderung tidak patuh terhadap kebijakan yang telah dibuat

3. Keingin untuk mencari untung dengan cepat.

Adanya keinginan mencari untung dengan cepat, menurut penjelasan Islamy (2007, h. 121) sering kali menyebabkan orang berupaya dengan cara menipu atau melawan hukum. Bila terdapat dua perusahaan memiliki kesempatan mencari untung yang sama yang satu karena perusahaannya akan bangrut dan tidak menguntungkan, maka perusahaan ini cenderung melawan hukum.

4. Adanya ketidak pastian hukum

Adanya ketidak pastian hukum, ketidak jelasan ukuran kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain, dan sebagaimana menurut penjelasan Islamy (2001, h. 121) hal tersebut dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum dan kebijakan negara.

Sesuai dengan penjelasan Islamy (2007,h.117) yang menjelaskan bahwa tidak tercapainya pelaksana kebijakan saja, hanya karena faktor-faktor yang menyebabkan seseorang enggan untuk melaksanakan kebijakan, akan tetapi menurut islamy (2007,h.117) juga terdapat pula faktor-faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan kebijakan, sehingga ketika tujuan tidak tercapai maka dapat dianggap tidak berhasilnya pelaksana kebijakan, hal- hal ini berpengaruh diantaranya:

1. Karena tersedianya sumber-sumber terbatas baik tenaga, biaya, waktu, dan sebagainya, sehingga dampak yang diharapkan tidak tercapai tetapi sebaliknya.
2. Karena kesalahan dalam pengadministrasian kebijakan akan dapat mengurangi tercapainya dampak-dampak kebijakan, karena baik dalam isinya kebijakan kalau tidak diimplementasikan akan sulit tercapainya.

3. Seringkali sejumlah problem-problem publik timbul karena adanya berbagai macam faktor, sedangkan kebijakan seringkali hanya atas salah satu dan sejumlah kecil faktor-faktor tersebut.
4. Adanya usaha-usaha tertentu yang memakan biaya yang lebih besar dari masalah-masalah sendiri.
5. Adanya masalah-masalah baru lebih menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang, dari masalah-masalah yang ada.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi seluruh masyarakat. Namun tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat juga harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara dalam hal ini masyarakat mematuhi dan melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan. Kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan juga akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan. Kebijakan yang dibuat pemerintah juga tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada pada lingkungannya. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, maka suatu kebijakan publik tidak akan efektif

2.2.3 Program KOTAKU

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang

dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat.

Khusus untuk bidang keciptaan karya, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

- a. Jalan Lingkungan
- b. Drainase Lingkungan
- c. Penyediaan Air Bersih/Minum
- d. Pengelolaan Persampahan
- e. Pengelolaan Air Limbah
- f. Pengamanan Kebakaran
- g. Ruang Terbuka Publik.

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi

perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dan sebagainya.

2.2.3.1 Strategi Pelaksanaan Program KOTAKU

Strategi pendamping Kotaku meliputi; penyusunan Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pendampingan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh perkotaan, keterpaduan penanganan permukiman kumuh perkotaan kementerian PUPR di 30 Kabupaten/Kota lokasi prioritas keterpaduan, program penangan kumuh berbasis masyarakat dengan revitalisasi BKM dari penanggulangan kemiskinan ke penanganan kumuh (KOTAKU).

Perubahan peran BKM ini dari kondisi awal, dimana BKM berorientasi pada penanggulangan kemiskinan, hanya mengelola dana BLM, menyusun PJM pronangkis dan melaksanakan kegiatan infrastruktur, sosial dan ekonomi menjadi berorientasi kepada penanganan kumuh, menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) membangun infrastruktur permukiman yang berskala lingkungan, dan menjaga kualitas permukiman yang didukung oleh perubahan perilaku masyarakat.

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penanganan kumuh melalui pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas kumuh.
2. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring, penanganan kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat.
3. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor.

4. Memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya.
5. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline) permukiman yang akan dijadikan pegangan bersama dalam perencanaan dan pengendalian.
6. Meningkatkan akses, terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota, mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan.
7. Advokasi kepastian, bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci.
8. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan. Pemberdayaan melalui program KOTAKU yang diberikan oleh pemerintah berupa pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, untuk itu masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi. Keterlibatan masyarakat dalam program KOTAKU sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan, masyarakat di libatkan secara aktif dimulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta sampai pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan. (Pedoman Umum Program KOTAKU, hal 5-6).

2.2.3.2 Prinsip Program KOTAKU

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah:

1. Pemerintah daerah sebagai Nahkoda Pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan/desa memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor maupun aktor di tingkatan pemerintah serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya.

2. Perencanaan komprehensif dan berorientasi outcome (pencapaian tujuan program) Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/kota yang berkontribusi pada pencapaian target nasional.
3. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Rencana penanganan permukiman kumuh merupakan produk Pemerintah Daerah sehingga mengacu pada visi kabupaten/kota dalam RPJMD. Rencana penanganan permukiman kumuh terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota dimana proses penyelenggaraan disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Rencana penanganan permukiman kumuh di tingkat kabupaten/kota mengakomodasi rencana di tingkat masyarakat, yang diikuti dengan integrasi penganggaran mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemkab/Pemkot hingga pemerintah desa dan kecamatan.
4. Partisipatif

Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (top-down) dan dari bawah (bottom-up) sehingga perencanaan di tingkat masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro/tingkat kota.
5. Kreatif dan Inovatif

Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni.
6. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang menjamin keberlanjutan program investasi KOTAKU harus memuat prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya

perlu diterapkan prinsip dan prosedur tertentu yang mengacu pada Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program KOTAKU.

7. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance) Prinsip ini menjadikan kegiatan penanganan permukiman kumuh sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri dengan menerapkan tata kelola yang baik (good governance)
8. Investasi penanganan permukiman kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.
9. Revitalisasi peran BKM, penajaman peran BKM dari orientasi penanggulangan kemiskinan kepada orientasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

2.2.3.3 Tujuan Program KOTAKU

Tujuan dari program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan diatas, dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan.
- b. Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta
- c. Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (livelihood) masyarakat.

Sesuai dengan *Permen PUPR No. 14 tahun 2018* Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang

terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Bangunan Gedung

- a. Ketidakteraturan bangunan
- b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang
- c. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat

2. Kondisi Jalan Lingkungan

- a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman
- b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

3. Kondisi Penyediaan Air Minum

- a. Akses aman air minum tidak tersedia
- b. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi

4. Kondisi Drainase Lingkungan

- a. Drainase lingkungan tidak tersedia
- b. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan
- c. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

- a. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
- b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan

- a. Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
- b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.

7. Kondisi Pengamanan (Proteksi) Kebakaran

- a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia
- b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

Dari karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria indicator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi permukiman kumuh dan perumahan kumuh

Program KOTAKU bukan cuma menangani permukiman kumuh yang ada, namun juga untuk mencegah pertumbuhan kumuh yang baru. Dalam penanganan perkumuhan yang dilakukan program KOTAKU yaitu pencegahan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan. Secara geografis Kelurahan Rabangodu utara dengan luas wilayah sebesar 76,35 Ha, terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 17 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima memiliki batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Penaraga
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Rabadompu Barat
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Rabangodu Selatan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Lewirato

Kawasan perencanaan merupakan kawasan yang di identifikasi sebagai kawasan kumuh sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Bima No. 188.45/583/65o/ix/2020 Tentang Penetapan Pemukiman kumuh yaitu sebagaimana yang diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. Lokasi Program kerja KOTAKU

Kelurahan	Alamat RT/RW	Luas Kumuh	Tingkat Kumuh
RABANGODU UTARA	RT001-RW001	1,03	KUMUH RINGAN
RABANGODU UTARA	RT002-RW001	3,66	KUMUH RINGAN
RABANGODU UTARA	RT015-RW006	1,38	KUMUH RINGAN

Sumber : KOTAKU kelurahan rabangodu utara, 2020

Kelurahan Rabangodu Utara masuk dalam Kawasan kotabaru sesuai dengan pembagian kawasan dalam penanganan kumuh perkotaan dalam dokumen SIAP (*Slum Improvement Action Plan*)/ RP2KPKP,

1. Perumahan

- a. Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan Lingkungan permukiman
- b. Melakukan Pemberdayaan dan Pendekatan pada Pemilik Rumah
- c. Memberikan stimulan/ fasilitasi rencana perbaikan RTLH (bedah rumah)
- d. Melakukan pembangunan RTLH
- e. Rehabilitasi Rumah Kumuh/Rumah Tidak Layak Huni

2. Jalan

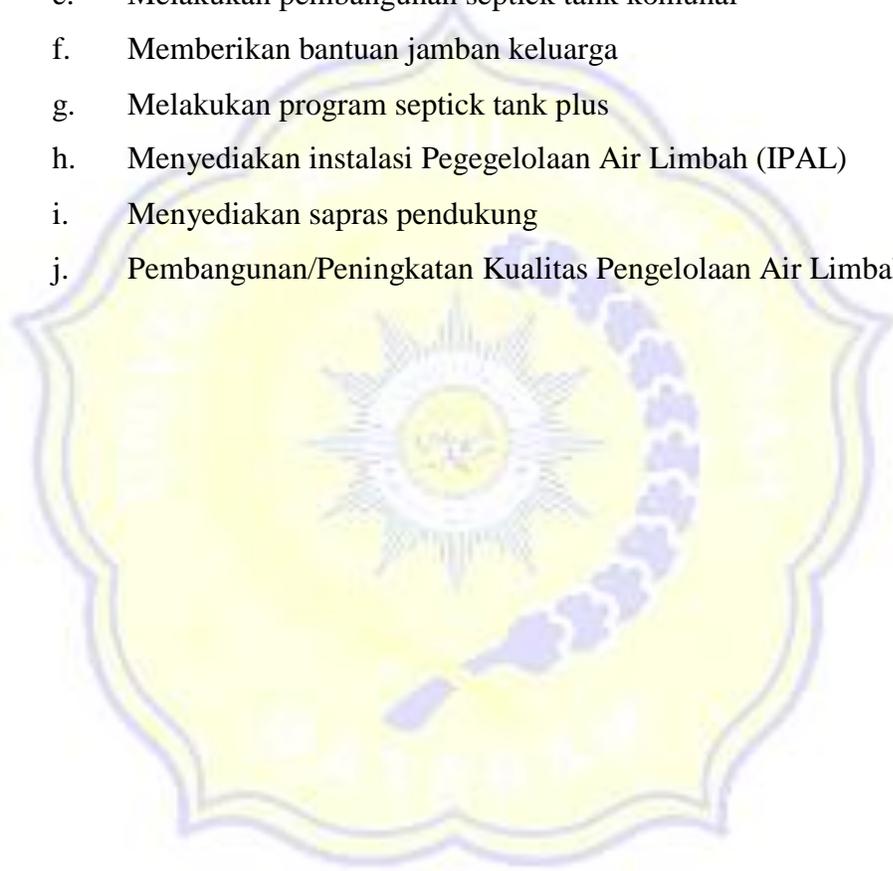
- a. Monitoring dan evaluasi hasil- hasil pembangun
- b. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan Jalan lingkungan
- c. Monitoring dan evaluasi hasil- hasil pembangun
- d. Peningkatan kualitas jalan
- e. Melakukan Pengasapalan jalan lingkungan
- f. Melakukan pavingnisasi jalan lingkungan
- g. Melakukan rabat jalan lingkungan
- h. Pembangunan/Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan

3. Drainase

- a. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pemeliharat drainase
- b. Pendampingan dan pemberian informasi tentang sistem drainase
- c. Melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan jaringan drainase
- d. Membentuk kelompok peduli lingkungan
- e. Melakukan pembangunan jaringan drainase
- f. Melakukan pemeliharaan jaringan drainase
- g. Menganggarkan kegiatan pemeliharaan dan pembangunan drainase

- h. Pembuatan sumur resapan dan biopori
 - i. Memperketat perijinan bangunan baru di kawasan konservasi
 - j. Normalisasi saluran Drainase
 - k. Pembangunan/Peningkatan Kualitas Drainase
4. Air minum
- a. Sosialisasi kepada masyarakat pemeliharaan sarana air bersih
 - b. pengawasan dan pengendalian SPAM berbasis masyarakat
 - c. Melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan jaringan air minum dan sumber mata air
 - d. Melakukan pemeliharaan jaringan air minum
 - e. Melakukan pembangunan jaringan air minum baru
 - f. Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih
 - g. Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih
 - h. Sistem Penyediaan Air Bersih
5. Sampah
- a. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah pada tempatnya
 - b. Pemberian insentif bagi masyarakat/ kelompok/ wilayah yang mampu mengelola sampahnya dengan baik sebagai wilayah percontohan
 - c. Pelatihan pengelolaan sampah 3R
 - d. Pengadaan alat pengolah sampah
 - e. Melakukan pembangunan Bank Sampah
 - f. Meningkatkan kuantitas dari tempat sampah (tong sampah, bak sampah)
 - g. Meningkatkan kapasitas dan cakupan pelayanan
 - h. Meningkatkan pengelolaan sampah yang menunjang pola 3R
 - i. Pembangunan/Peningkatan Kualitas Dan pengelolaan Persampahan

6. Air limbah
 - a. Melakukan pendataan dan inventarisasi jamban keluarga
 - b. Sosialisasi dan edukasitentang perilaku hidup bersih dan sehat
Melakukan
 - c. pendampingan terhadap masyarakat
 - d. Melakukan pembangunan jamban keluarga
 - e. Melakukan pembangunan septick tank komunal
 - f. Memberikan bantuan jamban keluarga
 - g. Melakukan program septick tank plus
 - h. Menyediakan instalasi Pegegelolaan Air Limbah (IPAL)
 - i. Menyediakan sapsras pendukung
 - j. Pembangunan/Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah



2.3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua penelitian terdahulu sebagai referensi dan komparasi dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai referensi dan komparasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel
1	Andi Lisma Lestari (2018)	Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bone	Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Akses air bersih/minum • Jalan • Drainase • Pengelolaan air limbah • Pengelolaan persampahan, dan • Penataan bangun dan lingkungan <p>Faktor pendukung dalam implementasi program KOTAKU ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perilaku organisasi dan antarorganisasi • Perilaku kelompok sasaran <p>Faktor penghambat dalam implementasi program KOTAKU ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perilaku birokrasi tingkat bawa
2	Istiqomah Solehatunnisa (2019)	Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar	Penelitian ini menggunakan penelitian descriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan Gedung • Jalan Lingkungan • Penyediaan Air Minum • Drainase Lingkungan • Pengelolaan Air Minum • Pengelolaan Persampahan • Ruang Terbuka Publik • Pengamanan Kebakaran

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel
		Lampung		

Sumber : Data Olahan, 2021

2.4. Sintesa Penelitian

Sintesa teori merupakan perumusan variabel yang digunakan dalam penelitian Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima. Variabel ini nantinya akan dijadikan acuan dalam menentukan metode penelitian. Berikut ini adalah tabel sintesis teori berdasarkan kajian pustaka:

Tabel 2.3. Sintesa penelitian

No	Sumber	Variabel	Sub Variabel
1	Andi Lisma Lestari (2018) "Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bone"	<ul style="list-style-type: none"> • Pogram KOTAKU di kabupaten bone 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses air bersih/minum • Jalan • Drainase • Pengelolaan air limbah • Pengelolaan persampahan, dan • Penataan bangun dan lingkungan
		<ul style="list-style-type: none"> • Faktor Pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku organisasi dan antarorganisasi • Perilaku kelompok sasaran
		<ul style="list-style-type: none"> • Faktor Penghambat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku birokrasi tingkat bawa
2	"Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung" Istiqomah	<ul style="list-style-type: none"> • Program KOTAKU di kecamatan tanjung karang timur kota bandar lampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan Gedung • Jalan Lingkungan • Penyediaan Air Minum • Drainase Lingkungan • Pengelolaan Air Minum • Pengelolaan Persampahan • Ruang Terbuka Publik • Pengamanan Kebakaran

No	Sumber	Variabel	Sub Variabel
	Solehatunnisa (2019)		

Sumber : Data Olahan, 2021



BAB III.METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Secara Administratif Kelurahan Rabangodu utara termasuk dalam Wilayah Kecamatan Raba kota bima, dengan luas wilayah sebesar 76,35 Ha, terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 17 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Rabangodu Utara yang masuk dalam Wilayah Kecamatan Raba Kota Bima memiliki batasan wilayah sebagai berikut :

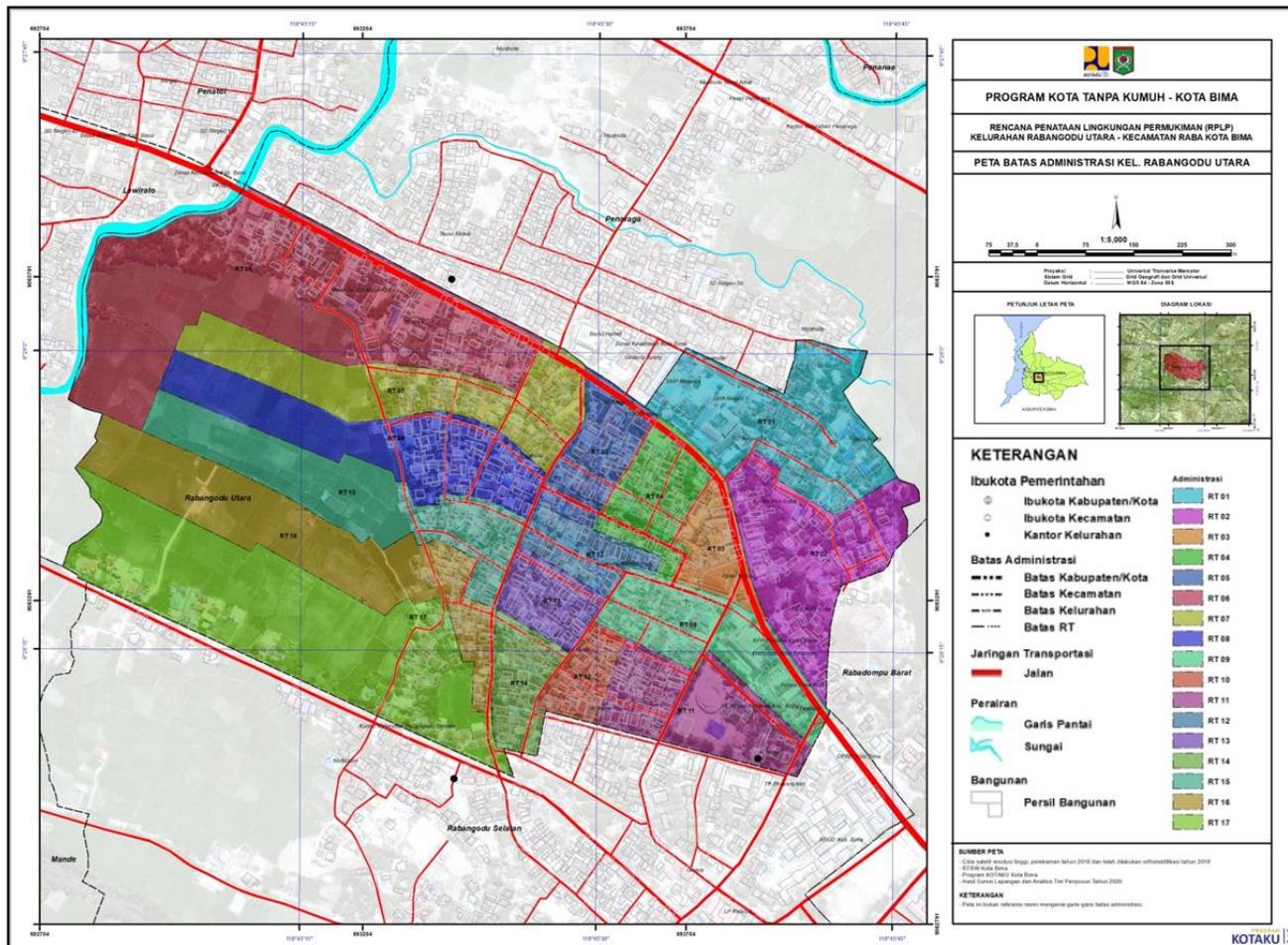
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Penaraga
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Rabadompu Barat
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Rabangodu Selatan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Lewirato

Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah administrasi di kelurahan Rabangodu Utara dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1. Tabel RT/RW Dan Luas Wilayah Kelurahan Rabangodu Utara

No	RT/RW	Luas Wilayah RT (Ha)
1	RT001-RW001	5,58
2	RT002-RW001	5,06
3	RT003-RW001	1,60
4	RT004-RW002	2,38
5	RT005-RW002	2,17
6	RT006-RW002	13,03
7	RT007-RW003	5,40
8	RT008-RW003	5,14
9	RT009-RW004	3,65
10	RT010-RW004	1,18
11	RT011-RW004	3,71
12	RT012-RW005	1,44
13	RT013-RW005	1,52
14	RT014-RW005	1,69
15	RT015-RW006	5,37
16	RT016-RW006	6,59
17	RT017-RW006	10,83
Luas Kelurahan Rabangodu Utara		76,35

Sumber: Profil Kelurahan Rabangodu Utara, 2020



Gambar 3.1. Peta Administrasi Kelurahan Rabangodu Utara
 Sumber : KOTAKU Kelurahan Rabangodu Utara

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, penggunaan jenis kualitatif pada penelitian ini berfungsi untuk menginterpretasikan hasil dari olahan data analisis. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Sementara data sekundernya adalah data jumlah penduduk yang ada wilayah penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Merupakan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu, yang merupakan dasar dari suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan. Masalah, tujuan, dan hipotesa penelitian, untuk sampai pada suatu kesimpulan harus didukung oleh data-data yang relevan. Relevansi data dengan variable-variable penelitian didasari oleh metode pendekatan masalah yang relevan. Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data sebagai data penelitian, Adapun jenis datanya yaitu:

3.3.1 Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui survey primer yang dilakukan melalui pengamatan dan pengukuran atau penghitungan langsung (observasi) disekitar kawasan Kelurahan Rabangodu Utara. Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung ke wilayah Kelurahan Rabangodu Utara.

3.3.2 Data Sekunder

Beberapa data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kondisi geografis lokasi yang didapatkan pada instansi terkait, data jumlah penduduk yang ada di Wilayah Kelurahan Rabangodu Utara, dan studi literature untuk mendapatkan literature yang berkaitan dengan penelitian (jurnal, buku, dsb). Setelah mengetahui jenis data yang di butuhkan, langkah selanjutnya adalah menentukan metode pengumpulan data.

3.3.1.1 Teknik Pengumpulan Jenis Data Primer

- Metode Wawancara

Pada penelitian ini metode wawancara ditujukan kepada fasilitator program KOTAKU yang ada di Kelurahan Rabangodu Utara tentang kondisi Kelurahan Rabangodu Utara.

- Metode Observasi

Pada penelitian ini metode Observasi dilakukan untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh yang ada di kawasan kelurahan Rabangodu Utara. Perbedaanya dengan metode wawancara adalah pengamatan ini berdasarkan apa yang dilihat dan dinilai oleh peneliti, sedangkan wawancara adalah mendengar pendapat dari narasumber. Observasi ini nantinya berfungsi untuk menginterpretasikan gambaran lokasi penelitian.

- Data Dokumentasi

Untuk melengkapi data maka kita memerlukan informasi dari data dokumentasi yang ada hubungannya dengan obyek yang menjadi studi. Yaitu dengan mengambil foto/gambar yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3.2.1 Teknik Pengumpulan Jenis Data Sekunder

- Metode Instansional

Metode ini dilakukan dengan cara mengambil data pada instansi terkait untuk mendapatkan data letak geografis dan jumlah penduduk. Selain itu data juga diperoleh melalui buku dan jurnal terkait.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat, nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpilannya (Sugiyono, 2007). Berdasarkan hasil sintesisi teori, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.2. Variabel penelitian

Sasaran/Tujuan	Variabel	Sub Variabel
Untuk Mengetahui Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima	<ul style="list-style-type: none"> • Program KOTAKU dikelurahan rabangodu utara 	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan • Jalan • Drainase • Air Minum • Sampah • Air Limbah
	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Interpretation • Organization • Application
Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rabangodu Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor Pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Respeknya Anggota Masyarakat terhadap Otoritas dan Keputusan keputusan Pemerintah. • Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. • Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat pejabat pemerintah yang berwenang untuk melalui prosedur yang benar. • Adanya hukuman-hukuman tertentu bila tidak melaksanakan kebijakan. • Adanya kepentingan pribadi.
	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor Penghambat 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya ketidak patuhan selektif terhadap hukum • Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi • Keingin untuk mencari untung dengan cepat. • Adanya ketidak pastian hukum

Sumber : Data hasil olahan Peneliti, 2021

3.5 Metode Analisis Data

Tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian, untuk menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian sesuai dengan sasaran penelitian yang akan dicapai yaitu:

3.5.1. Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif lebih berhubungan dengan pengumpulan, peringkasan serta penyajian hasil peringkasan data (Pabundu, 2005). Analisis ini digunakan untuk mengetahui distribusi data dan karakteristik dari penggunaan lahan. Tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu :

1. Reduksi data Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema seta polanya. dan yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.
2. Paparan data Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisa data.

Jadi analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif. Setelah memperoleh data dari lapangan kemudian disusun secara sistematis, serta selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut dengan cara menggambarkan fakta dan gejala yang ada dilapangan, kemudian data tersebut dianalisis, sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

3.6 Desain Survey

Tabel 3.3. Desain Survey

No	Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Kebutuhan Data	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data
1	Untuk Mengetahui Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima	- Program KOTAKU	- Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan Lingkungan permukiman - Melakukan Pemberdayaan dan Pendekatan pada Pemilik Rumah - Memberikan stimulan/fasilitasi rencana perbaikan RTLH (bedah rumah) - Melakukan pembangunan RTLH - Rehabilitasi Rumah Kumuh/Rumah Tidak Layak Huni 	<ul style="list-style-type: none"> - Arsip dan dokumentasi kelurahan. - Keadaan fisik lokasi yang diteliti - Responden atau Masyarakat yang tinggal di Kel. Rabangodu utara 	<ul style="list-style-type: none"> - Studi daftar pustaka - Observasi - Wawancara mendalam 	- Reduksi data
			- Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan evaluasi hasil- hasil pembangun - Melibatkan masyarakat dalam pembangunan Jalan lingkungan - Monitoring dan evaluasi hasil- hasil pembangun - Peningkatan kualitas jalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Arsip dan dokumentasi kelurahan - Keadaan fisik lokasi yang diteliti - Responden atau Masyarakat yang tinggal di Kel. Rabangodu utara 	<ul style="list-style-type: none"> - Studi daftar pustaka - Observasi - Wawancara mendalam 	- Reduksi data

			<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Pengasapalan jalan lingkungan - Melakukan pavingnisasi jalan lingkungan - Melakukan rabat jalan lingkungan - Pembangunan/Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan 			
		- Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada masyarakat pemeliharaan sarana air bersih - pengawasan dan pengendalian SPAM berbasis masyarakat - Melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan jaringan air minum dan sumber mata air - Melakukan pemeliharaan jaringan air minum - Melakukan pembangunan jaringan air minum baru - Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih - Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> - Arsip dan dokumentasi kelurahan. - Keadaan fisik lokasi yang diteliti - Responden atau Masyarakat yang tinggal di Kel. Rabangodu utara 	<ul style="list-style-type: none"> - Studi daftar pustaka - Observasi - Wawancara mendalam 	- Reduksi data

				<ul style="list-style-type: none"> - Sistim Penyediaan Air Bersih 			
			<ul style="list-style-type: none"> - Sampah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah pada tempatnya - Pemberian insentif bagi masyarakat/ kelompok/ wilayah yang mampu mengelola sampahnya dengan baik sebagai wilayah percontohan - Pelatihan pengelolaan sampah 3R - Pengadaan alat pengolah sampah - Melakukan pembangunan Bank Sampah - Meningkatkan kuantitas dari tempat sampah (tong sampah, bak sampah) - Meningkatkan kapasitas dan cakupan pelayanan - Meningkatkan pengelolaan sampah yang menunjang pola 3R 	<ul style="list-style-type: none"> - Arsip dan dokumentasi kelurahan. - Keadaan fisik lokasi yang diteliti - Responden atau Masyarakat yang tinggal di Kel. Rabangodu utara 	<ul style="list-style-type: none"> - Studi daftar pustaka - Observasi - Wawancara mendalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Reduksi data

				<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan/Peningkatan Kualitas Dan pengelolaan Persampahan 			
			<ul style="list-style-type: none"> - drainase 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pemeliharaan drainase - Pendampingan dan pemberian informasi tentang sistem drainase - Melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan jaringan drainase - Membentuk kelompok peduli lingkungan - Melakukan pembangunan jaringan drainase - Melakukan pemeliharaan jaringan drainase - Menganggarkan kegiatan pemeliharaan dan pembangunan drainase - Pembuatan sumur resapan dan biopori - Memperketat perijinan bangunan baru di kawasan konservasi - Normalisasi saluran Drainase - Pembangunan/Peningk 	<ul style="list-style-type: none"> - Arsip dan dokumentasi kelurahan. - Keadaan fisik lokasi yang diteliti - Responden atau Masyarakat yang tinggal di Kel. Rabangodu utara 	<ul style="list-style-type: none"> - Studi daftar pustaka - Observasi - Wawancara mendalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Reduksi data

			atan Kualitas Drainase			
		Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan dan inventarisasi jamban keluarga - Sosialisasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat Melakukan pendampingan terhadap masyarakat - Melakukan pembangunan jamban keluarga - Melakukan pembangunan septick tank komunal - Memberikan bantuan jamban keluarga - Melakukan program septick tank plus - Menyediakan instalasi Pegeelolaan Air Limbah (IPAL) - Menyediakan sapras pendukung - Pembangunan/Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah 	<ul style="list-style-type: none"> - Arsip dan dokumentasi kelurahan. - Keadaan fisik lokasi yang diteliti - Responden atau Masyarakat yang tinggal di Kel. Rabangodu utara 	<ul style="list-style-type: none"> - Studi daftar pustaka - Observasi - Wawancara mendalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Reduksi data
	- Implementasi	- Interpretation	- Program KOTAKU di Kelurahan Rabangodu Utara	- Aparatur KOTAKU	- Wawancara	- Reduksi data

			- Organization	<ul style="list-style-type: none"> - Program KOTAKU di Kelurahan Rabangodu Utara - Organisasi pemerintahan dan organisasi desa yang berkaitan 	<ul style="list-style-type: none"> - Aparatur KOTAKU - Arsip dan dokumentasi Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara - Studi daftar pustaka 	- Reduksi data
			- Application	<ul style="list-style-type: none"> - Aturan-aturan yang digunakan dalam pelaksanaan KOTAKU 	<ul style="list-style-type: none"> - Aparatur KOTAKU - Arsip dan dokumentasi Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara - Studi daftar pustaka 	- Reduksi data
2	Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program kota tanpa kumuh di Kelurahan rabangodu utara	- Faktor Pendukung dan penghambat	- Faktor pendukung	<ul style="list-style-type: none"> - Respeknya Anggota Masyarakat terhadap Otoritas dan Keputusan keputusan Pemerintah. - Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. - Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat pejabat pemerintah yang berwenang untuk melalui prosedur yang benar. - Adanya hukuman-hukuman tertentu bila tidak melaksanakan kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aparatur KOTAKU - Arsip dan dokumentasi Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara - Studi daftar pustaka 	- Reduksi data

				- Adanya kepentingan pribadi.			
			- Faktor Penghambat	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketidak patuhan selektif terhadap hukum - Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi - Keingin untuk mencari untung dengan cepat. - Adanya ketidak pastian hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Aparatur KOTAKU - Arsip dan dokumentasi Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara - Studi daftar pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> - Reduksi data

Sumber : Data hasil olahan Peneliti, 2021

